

## ABSTRAK

Formulasi dan implementasi mendorong aktivitas pemanfaatan fungsi lahan tentunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih tidak diletakkan pada pencapaian keseimbangan lingkungan, karena terdapat tumpang tindih dalam pengendalian dan pemanfaatan ruangnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisa kelebihan dan kelemahan dari Peraturan Daerah (PerDa) NOMOR 12 TAHUN 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif/kualitatif menggambarkan masalah yang akan diteliti mengenai Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sumenep No. 12 Tahun 2013 tentang RTRW.

Hasil penelitian yang fokus terhadap *Evaluasi Formulasi, Evaluasi Proses, Evaluasi Konteks, dan, Evaluasi Dampak* menggunakan fungsi evaluasi kebijakan menurut Nugroho (2004:463) yakni *Eksplansi, Kepatuhan, Audit, dan Akunting* dapat diambil kesimpulan bahwa Pada kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Sumenep masih minim partisipasi masyarakat dan belum adanya pedoman prosedural untuk mengidentifikasi potensi lokasi, selain itu adanya konflik kepentingan antara DPRD dan *stakeholder* yang cukup masif. Hal tersebut yang mempengaruhi substansi Perda RTRW Kabupaten Sumenep terdapat ketidaksinkronan dan tumpang tindih. Maka diperlukan sinergitas berbagai pihak, dibutuhkan peninjauan dan revisi PerDa RTRW, dan penertiban administrasi perizinan terhadap alih fungsi lahan.

**Kata Kunci : Evaluasi, Pembangunan, RTRW, Bappeda, Kab. Sumenep**

## ABSTRACT

Formulation and implementation encourage activities to utilize land functions, of course Regional Regulation Number 12 of 2013 concerning Regional Spatial Planning (RTRW) is still not placed on achieving environmental balance, because there is overlap in the control and use of space. The purpose of this research is to describe and analyze the strengths and weaknesses of Regional Regulation (PerDa) NUMBER 12 OF 2013 concerning District Spatial Planning. Sumenep. This research uses a descriptive/qualitative method to describe the problems to be studied regarding District Regional Regulations (Perda). Sumenep No. 12 of 2013 concerning RTRW.

The results of research that focuses on Formulation Evaluation, Process Evaluation, Context Evaluation, and Impact Evaluation using the policy evaluation function according to Nugroho (2004:463), namely Explanation, Compliance, Audit and Accounting, can be concluded that the regional spatial planning policy of Sumenep Regency is still There is minimal community participation and there are no procedural guidelines for identifying potential locations, apart from that there is a fairly massive conflict of interest between the DPRD and stakeholders. This is what influences the substance of the Sumenep Regency RTRW Regional Regulation, there are inconsistencies and overlaps. So synergy between various parties is needed, a review and revision of the RTRW Regional Regulation is needed, and the administration of permits for land conversion is needed.

**Keywords: Evaluation, Development, RTRW, Bappeda, Kab. Sumenep**